RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penambahan, perubahan, dan penghapusan jabatan dan kelas jabatan, serta penataan birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu menyesuaikan jabatan dan kelas jabatan pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
b. bahwa penetapan terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/637/M.SM.04.00/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;
c. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi, sehingga perlu untuk diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

DRAFT

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta;
5. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.02/A/OT/VIII/2003/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Konferensi Asia Afrika;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Indeks Perwakilan pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 201);
11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

DRAFT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan/atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai dalam suatu unit organisasi.
5. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II
JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.

DRAFT

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Jabatan Manajerial; dan
   b. Jabatan Nonmanajerial.

(3) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. jabatan pimpinan tinggi madya;
   b. jabatan pimpinan tinggi pratama;
   c. jabatan administrator; dan
   d. jabatan pengawas.

(4) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. jabatan fungsional; dan
   b. jabatan pelaksana.

(5) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terdapat Jabatan Lainnya di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 3

(1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatan.

(2) Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Nonmanajerial tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Lainnya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

(1) Tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan Jabatannya.

(2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terdampak penataan birokrasi diberikan dengan ketentuan:
   a. dalam hal penghasilan pejabat administrator atau pejabat pengawas yang dialihkan menjadi pejabat fungsional mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan administrator atau jabatan pengawasnya; atau
   b. dalam hal penghasilan pejabat administrator atau pejabat pengawas yang dialihkan menjadi pejabat fungsional tidak mengalami

DRAFT

penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan fungsionalnya.

(3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian tunjangan kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DRAFT

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ...

DRAFT

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	MENTERI LUAR NEGERI	Tanpa Kelas
2.	WAKIL MENTERI LUAR NEGERI	Tanpa Kelas
SEKRETARIAT JENDERAL		
3.	SEKRETARIS JENDERAL	17
4.	Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan	15
5.	Kepala Bagian Dukungan Isu-Isu Tematik	13
6.	Kepala Bagian Dukungan Hubungan Antarnegara	13
7.	Kepala Bagian Dukungan Hubungan Media Pimpinan dan Juru Bicara	13
8.	Kepala Bagian Kesekretariatan dan Korespondensi Pimpinan	13
9.	Kepala Bagian Umum	13
10.	Kepala Subbagian Administrasi Keuangan	10
11.	Kepala Subbagian Keamanan dan Kerumahtanggaan Pimpinan	10
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
13.	Kepala Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan	15
14.	Kepala Bagian Administrasi Kementerian	13
15.	Kepala Subbagian Dukungan Substansi dan Tata Usaha Sekretaris Jenderal	10
16.	Kepala Subbagian Dukungan Substansi dan Tata Usaha Staf Ahli	10
17.	Kepala Subbagian Dukungan Substansi dan Tata Usaha Staf Khusus	10
18.	Kepala Bagian Administrasi Perwakilan	13
19.	Kepala Subbagian Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri	10
20.	Kepala Subbagian Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya	10
21.	Kepala Bagian Fasilitasi Koordinasi Kebijakan Luar Negeri	13
22.	Kepala Bagian Dukungan Layanan Pimpinan Perwakilan	13
23.	Kepala Subbagian Administrasi Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	10

DRAFT

24.	Kepala Subbagian Administrasi Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kawasan Amerika dan Eropa	10
25.	Kepala Subbagian Administrasi Konsul Kehormatan Republik Indonesia	10
26.	Kepala Bagian Persuratan dan Umum	13
27.	Kepala Subbagian Persuratan	10
28.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
29.	Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Jenderal	10
30.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	15
31.	Kepala Bagian Perencanaan Kinerja Kementerian dan Perwakilan	13
32.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah I	10
33.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah II	10
34.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah III	10
35.	Kepala Bagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Kementerian dan Perwakilan	13
36.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah I	10
37.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah II	10
38.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah III	10
39.	Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Kementerian dan Perwakilan	13
40.	Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah I	10
41.	Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah II	10
42.	Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah III	10
43.	Kepala Bagian Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan	13
44.	Kepala Subbagian Organisasi Kementerian	10
45.	Kepala Subbagian Organisasi Perwakilan I	10
46.	Kepala Subbagian Organisasi Perwakilan II	10
47.	Kepala Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan	13
48.	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Kementerian dan Perwakilan	10
49.	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan	10
50.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan	10
51.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
52.	Kepala Bagian Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan	13
53.	Kepala Subbagian Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara	10
54.	Kepala Subbagian Karier, Kompetensi, dan Kinerja	10
55.	Kepala Subbagian Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	10
56.	Kepala Bagian Administrasi Jabatan, Gelar, dan Pangkat	13
57.	Kepala Subbagian Kepangkatan dan Gelar Diplomatik I	10
58.	Kepala Subbagian Kepangkatan dan Gelar Diplomatik II	10

DRAFT

59.	Kepala Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan	10
60.	Kepala Bagian Pengisian Jabatan dan Mutasi	13
61.	Kepala Subbagian Mutasi Luar Negeri Wilayah Asia Pasifik dan Afrika	10
62.	Kepala Subbagian Mutasi Luar Negeri Wilayah Amerika dan Eropa	10
63.	Kepala Subbagian Pengisian Jabatan dan Mutasi Dalam Negeri	10
64.	Kepala Bagian Manajemen Pegawai Setempat	13
65.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Setempat	10
66.	Kepala Subbagian Perjanjian Kerja dan Kinerja Pegawai Setempat Wilayah Asia Pasifik dan Afrika	10
67.	Kepala Subbagian Perjanjian Kerja dan Kinerja Pegawai Setempat Wilayah Amerika dan Eropa	10
68.	Kepala Bagian Pembinaan, Kesejahteraan, dan Tata Usaha	13
69.	Kepala Subbagian Penghargaan, Pembinaan dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	10
70.	Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Pelindungan Aparatur Sipil Negara	10
71.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan	10
72.	Kepala Biro Keuangan	15
73.	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran	13
74.	Kepala Subbagian Penyiapan Anggaran	10
75.	Kepala Subbagian PNBP dan Penyelesaian Beban Pusat	10
76.	Kepala Subbagian Gaji dan Tunjangan	10
77.	Kepala Bagian Pengendalian Anggaran	13
78.	Kepala Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik	10
79.	Kepala Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika	10
80.	Kepala Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah	10
81.	Kepala Bagian Verifikasi Anggaran	13
82.	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik	10
83.	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika	10
84.	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah	10
85.	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	13
86.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah Asia dan Pasifik	10
87.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah Eropa dan Afrika	10
88.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah Amerika dan Timur Tengah	10
89.	Kepala Bagian Perbendaharaan	13
90.	Kepala Subbagian Pembinaan Ketatausahaan Keuangan	10

DRAFT

91.	Kepala Subbagian Administrasi Pejabat Perbendaharaan dan Kerugian Negara	10
92.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
93.	Kepala Biro Hukum	15
94.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	13
95.	Kepala Bagian Layanan Hukum	13
96.	Kepala Bagian Kerja Sama	13
97.	Kepala Bagian Kearsipan, Pengelolaan Informasi Hukum, dan Tata Usaha	13
98.	Kepala Subbagian Kearsipan	10
99.	Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi Hukum	10
100.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
101.	Kepala Biro Umum dan Pengadaan	15
102.	Kepala Bagian Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana	13
103.	Kepala Subbagian Wilayah I	10
104.	Kepala Subbagian Wilayah II	10
105.	Kepala Subbagian Wilayah III	10
106.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	13
107.	Kepala Subbagian Pengadaan Barang/Jasa	10
108.	Kepala Subbagian Pembinaan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	10
109.	Kepala Subbagian Pengadaan Secara Elektronik	10
110.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	13
111.	Kepala Subbagian Wilayah I	10
112.	Kepala Subbagian Wilayah II	10
113.	Kepala Subbagian Wilayah III	10
114.	Kepala Bagian Pemeliharaan	13
115.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10
116.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Mesin	10
117.	Kepala Subbagian Urusan Dalam	10
118.	Kepala Bagian Pengamanan dan Kerumahtanggaan	13
119.	Kepala Subbagian Pengamanan Diplomatik	10
120.	Kepala Subbagian Keamanan dan Ketertiban	10
121.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA		
122.	DIREKTUR JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	17
123.	Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	15
124.	Kepala Bagian Perencanaan	13
125.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
126.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
127.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
128.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
129.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
130.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10

DRAFT

131.	Kepala Bagian Keuangan	13
132.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
133.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
134.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
135.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	10
136.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	10
137.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
138.	Kepala Bagian Fasilitasi Kerja Sama Antarlembaga dan Kertas Kerja	13
139.	Direktur Asia Tenggara	15
140.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
141.	Direktur Asia Timur	15
142.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
143.	Direktur Pasifik dan Oseania	15
144.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
145.	Direktur Asia Selatan dan Tengah	15
146.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
147.	Direktur Timur Tengah	15
148.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
149.	Direktur Afrika	15
150.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
151.	Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika	15
152.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA		
153.	DIREKTUR JENDERAL AMERIKA DAN EROPA	17
154.	Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	15
155.	Kepala Bagian Perencanaan	13
156.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
157.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
158.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
159.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
160.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
161.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
162.	Kepala Bagian Keuangan	13
163.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
164.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
165.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
166.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	10
167.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	10
168.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
169.	Kepala Bagian Fasilitasi Kerja Sama Antarlembaga dan	13

DRAFT

	Kertas Kerja	
170.	Direktur Amerika I	15
171.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
172.	Direktur Amerika II	15
173.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
174.	Direktur Eropa I	15
175.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
176.	Direktur Eropa II	15
177.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
178.	Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	15
179.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN		
180.	DIREKTUR JENDERAL KERJA SAMA ASEAN	17
181.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN	15
182.	Kepala Bagian Perencanaan	13
183.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
184.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
185.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
186.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
187.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
188.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
189.	Kepala Bagian Keuangan	13
190.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
191.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
192.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
193.	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	10
194.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, dan Kearsipan	10
195.	Kepala Subbagian Dukungan Pimpinan dan Publikasi	10
196.	Kepala Bagian Kerja Sama Antarpilar	13
197.	Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN	15
198.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
199.	Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN	15
200.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
201.	Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN	15
202.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
203.	Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN	15
204.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL		
205.	DIREKTUR JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL	17
206.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	15
207.	Kepala Bagian Perencanaan	13
208.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
209.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
210.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10

DRAFT

211.	Kepala Bagian Umum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	13
212.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	10
213.	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kearsipan	10
214.	Kepala Subbagian Dukungan Pimpinan, Kertas Kerja, dan Publikasi	10
215.	Kepala Bagian Keuangan	13
216.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
217.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
218.	Kepala Bagian Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional	13
219.	Kepala Bagian Pencalonan Indonesia pada Organisasi Internasional	13
220.	Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional	15
221.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
222.	Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi	15
223.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
224.	Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup	15
225.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
226.	Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis	15
227.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL		
228.	DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	17
229.	Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	15
230.	Kepala Bagian Perencanaan	13
231.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
232.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
233.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
234.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
235.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
236.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
237.	Kepala Bagian Keuangan	13
238.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
239.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
240.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
241.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	10
242.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	10
243.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
244.	Kepala Bagian Tata Kelola Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional dan Kerja Sama Antarlembaga	13
245.	Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	15
246.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10

DRAFT

247.	Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi	15
248.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
249.	Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya	15
250.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
251.	Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan	15
252.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN EKONOMI DAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN		
253.	DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN EKONOMI DAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN	17
254.	Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan	15
255.	Kepala Bagian Perencanaan	13
256.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
257.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
258.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
259.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
260.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
261.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
262.	Kepala Bagian Keuangan	13
263.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
264.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
265.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
266.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	10
267.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	10
268.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
269.	Kepala Bagian Fasilitasi Kerja Sama Antarlembaga dan Kertas Kerja	13
270.	Direktur Perdagangan Internasional	15
271.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
272.	Direktur Investasi dan Ekonomi Kreatif	15
273.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
274.	Direktur Sumber Daya dan Industrialisasi	15
275.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
276.	Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional	15
277.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK		
278.	DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	17
279.	Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	15
280.	Kepala Bagian Perencanaan	13
281.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
282.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
283.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10

DRAFT

284.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
285.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
286.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
287.	Kepala Bagian Keuangan	13
288.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
289.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
290.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
291.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	10
292.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	10
293.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
294.	Kepala Bagian Fasilitasi Kerja Sama Antarlembaga dan Kertas Kerja	13
295.	Kepala Subbagian Kerja Sama Antarlembaga	10
296.	Kepala Subbagian Kertas Kerja dan Laporan	10
297.	Kepala Subbagian Dukungan Pimpinan	10
298.	Direktur Informasi dan Media	15
299.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
300.	Direktur Diplomasi Publik	15
301.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
302.	Direktur Urusan Diaspora	15
303.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
304.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Konferensi Asia Afrika	13
305.	Kepala Seksi Publikasi dan Promosi Nilai-nilai Konferensi Asia Afrika	10
306.	Kepala Seksi Pelestarian dan Dokumentasi Diplomasi Publik	10
307.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER		
308.	DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	17
309.	Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	15
310.	Kepala Bagian Perencanaan	13
311.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
312.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
313.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
314.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
315.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
316.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
317.	Kepala Bagian Keuangan	13
318.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
319.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
320.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
321.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	10
322.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara	10

DRAFT

	dan Kerumahtanggaan	
323.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
324.	Kepala Bagian Dukungan Pimpinan, Kertas Kerja, Korespondensi Diplomatik, dan Analisis Pelayanan Publik	13
325.	Kepala Subbagian Dukungan Pimpinan dan Kertas Kerja	10
326.	Kepala Subbagian Korespondensi Diplomatik	10
327.	Kepala Subbagian Analisis Data dan Pelayanan Publik	10
328.	Direktur Protokol	15
329.	Kepala Subdirektorat Kunjungan Luar Negeri	13
330.	Kepala Subdirektorat Tamu Negara Asing	13
331.	Kepala Subdirektorat Dukungan Keprotokolan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri	13
332.	Kepala Subdirektorat Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan	13
333.	Kepala Subdirektorat Pertemuan Internasional dan Kerja Sama Antarlembaga	13
334.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
335.	Direktur Konsuler	15
336.	Kepala Subdirektorat Paspor Diplomatik dan Dinas	13
337.	Kepala Subdirektorat Visa Diplomatik dan Dinas	13
338.	Kepala Subdirektorat Perizinan Tinggal Diplomatik dan Dinas serta Perizinan Organisasi Kemasyarakatan Asing	13
339.	Kepala Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Pelayaran, dan Legalisasi	13
340.	Kepala Subdirektorat Jasa Kekonsuleran	13
341.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
342.	Direktur Fasilitas Diplomatik	15
343.	Kepala Subdirektorat Kendaraan Bermotor	13
344.	Kepala Subdirektorat Perpajakan	13
345.	Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Fasilitas Kunjungan Daerah	13
346.	Kepala Subdirektorat Perizinan dan Bangunan	13
347.	Kepala Subdirektorat Barang Diplomatik dan Pas Bandara	13
348.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
349.	Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia	15
350.	Kepala Subdirektorat Kawasan Asia Tenggara	13
351.	Kepala Subdirektorat Kawasan Timur Tengah	13
352.	Kepala Subdirektorat Kawasan Lain di Luar Asia Tenggara dan Timur Tengah	13
353.	Kepala Subdirektorat Tata Kelola dan Diplomasi Pelindungan	13
354.	Kepala Subdirektorat Sistem dan Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik	13
355.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
INSPEKTORAT JENDERAL		
356.	INSPEKTUR JENDERAL	17

DRAFT

357.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
358.	Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian	13
359.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	10
360.	Kepala Subbagian Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko	10
361.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
362.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
363.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
364.	Kepala Bagian Keuangan, Perlengkapan, dan Tata Usaha	13
365.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	10
366.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
367.	Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	13
368.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan dan Kepatuhan Pegawai	10
369.	Kepala Subbagian Pengelolaan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi	10
370.	Inspektur Wilayah I	15
371.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
372.	Inspektur Wilayah II	15
373.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
374.	Inspektur Wilayah III	15
375.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
376.	Inspektur Wilayah IV	15
377.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI		
378.	KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	17
379.	Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	15
380.	Kepala Bagian Perencanaan	13
381.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
382.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
383.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
384.	Kepala Bagian Umum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	13
385.	Kepala Subbagian Perlengkapan	10
386.	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan	10
387.	Kepala Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	10
388.	Kepala Bagian Keuangan	13
389.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
390.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
391.	Kepala Bagian Ketatausahaan, Publikasi, dan Kerja Sama	13
392.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
393.	Kepala Subbagian Publikasi dan Diseminasi	10
394.	Kepala Subbagian Kerja Sama Antarlembaga	10
395.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	15
396.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10

DRAFT

397.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa	15
398.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
399.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral	15
400.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
401.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data	15
402.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
PUSAT		
403.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	15
404.	Kepala Bidang Analisis, Pengembangan, Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan dan Layanan Perpustakaan	13
405.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kekanseleraian	13
406.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Informasi Diplomatik	13
407.	Kepala Bidang Kerja Sama dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan	13
408.	Kepala Bagian Tata Usaha	13
409.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja dan Keuangan	10
410.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum	10
411.	Direktur Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU)	14
412.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12
413.	Kepala Seksi Penguasaan Pengetahuan dan Keahlian Dasar Diplomasi	10
414.	Kepala Seksi Penguasaan Keterampilan Dasar Diplomasi	10
415.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
416.	Direktur Unit Pelaksana Teknis Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU)	14
417.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12
418.	Kepala Seksi Peningkatan Pengetahuan dan Keahlian Diplomasi	10
419.	Kepala Seksi Peningkatan Keterampilan Diplomasi	10
420.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
421.	Direktur Unit Pelaksana Teknis Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU)	14
422.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12
423.	Kepala Seksi Kepemimpinan Diplomasi	10
424.	Kepala Seksi Manajemen Diplomasi	10
425.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
426.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	15
427.	Kepala Bidang Data dan Tata Kelola Teknologi Informasi	13
428.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pusat Data	13
429.	Kepala Bidang Sistem Informasi	13
430.	Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Siber	13
431.	Kepala Bagian Tata Usaha	13

DRAFT

432.	Kepala Subbagian Kinerja, Keuangan, dan Organisasi	10
433.	Kepala Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia	10
434.	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	15
435.	Kepala Bidang Standardisasi dan Kerja Sama Pembinaan Jabatan Fungsional	13
436.	Kepala Bidang Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	13
437.	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitasi	13
438.	Kepala Bagian Tata Usaha	13
439.	Kepala Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia	10
440.	Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Evaluasi	10

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO

DRAFT

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN NONMANAJERIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

I. Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Diplomat Ahli Utama	14
2.	Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia (Diplomat Ahli Madya yang diberikan tugas tambahan sebagai Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN)	14
3.	Diplomat Ahli Madya	12
4.	Diplomat Ahli Muda	10
5.	Diplomat Ahli Pertama	8
6.	Penata Kanselerai Ahli Madya	11
7.	Penata Kanselerai Ahli Muda	9
8.	Penata Kanselerai Ahli Pertama	8
9.	Pranata Informasi Diplomatik Ahli Madya	11
10.	Pranata Informasi Diplomatik Ahli Muda	9
11.	Pranata Informasi Diplomatik Ahli Pertama	8
12.	Arsiparis Ahli Madya	11
13.	Arsiparis Ahli Muda	9
14.	Arsiparis Ahli Pertama	8
15.	Arsiparis Penyelia	8
16.	Arsiparis Mahir	7
17.	Arsiparis Terampil	6
18.	Auditor Ahli Madya	12
19.	Auditor Ahli Muda	10
20.	Auditor Penyelia	9
21.	Auditor Ahli Pertama	8
22.	Auditor Mahir	7
23.	Sandiman Ahli Madya	12
24.	Sandiman Ahli Muda	10
25.	Sandiman Penyelia	9
26.	Sandiman Mahir	8
27.	Widyaiswara Ahli Madya	12
28.	Widyaiswara Ahli Muda	10
29.	Widyaiswara Ahli Pertama	8
30.	Pamong Budaya Ahli Madya	11
31.	Pamong Budaya Ahli Muda	9
32.	Pamong Budaya Ahli Pertama	8

DRAFT

33.	Pamong Budaya Penyelia	8
34.	Pamong Budaya Mahir	7
35.	Pamong Budaya Terampil	6
36.	Pustakawan Ahli Madya	11
37.	Pustakawan Ahli Muda	9
38.	Pustakawan Ahli Pertama	8
39.	Pustakawan Penyelia	8
40.	Pustakawan Mahir	7
41.	Pustakawan Terampil	6
42.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
43.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
44.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
45.	Dokter Ahli Madya	12
46.	Dokter Ahli Muda	10
47.	Dokter Ahli Pertama	9
48.	Dokter Gigi Ahli Madya	12
49.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
50.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
51.	Perawat Ahli Muda	10
52.	Perawat Ahli Pertama	8
53.	Perawat Penyelia	8
54.	Perawat Mahir	7
55.	Perawat Terampil	6
56.	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8
57.	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
58.	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
59.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
60.	Apoteker Ahli Muda	10
61.	Apoteker Ahli Pertama	8
62.	Asisten Apoteker Terampil	6
63.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6
64.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
65.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
66.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
67.	Perencana Ahli Madya	12
68.	Perencana Ahli Muda	10
69.	Perencana Ahli Pertama	8
70.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
71.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
72.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
73.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
74.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
75.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
76.	Pranata Komputer Penyelia	8
77.	Pranata Komputer Mahir	7
78.	Pranata Komputer Terampil	6
79.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
80.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
81.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
82.	Analis Kebijakan Ahli Muda	10
83.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8

DRAFT

84.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
85.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
86.	Analis Hukum Ahli Ahli Madya	11
87.	Analis Hukum Ahli Ahli Muda	9
88.	Analis Hukum Ahli Ahli Pertama	8
89.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
90.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
91.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
92.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
93.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
94.	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	10
95.	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	8

II. Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana

NO.	**NAMA JABATAN**	**KELAS JABATAN**
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
2.	Penata Layanan Operasional	7
3.	Pengolah Data dan Informasi	6
4.	Dokumentalis Hukum	6
5.	Pengelola Keprotokolan	6
6.	Pengelola Layanan Operasional	6
7.	Operator Layanan Operasional	5

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO

DRAFT

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NO.	**NAMA JABATAN**	**KELAS JABATAN**
1.	Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	16
2.	Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi	16
3.	Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia	16
4.	Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga	16
5.	Staf Ahli Bidang Manajemen	16
6.	Staf Khusus	16

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO

DRAFT